

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 6 JAWA TENGAH DIY
DENGAN
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SEWA RUANGAN UNTUK LE GUBERNURAN 50243D**

Nomor : 1331/Umum/Sarana/6/0118

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua ribu delapan belas (01-02-2018) bertempat di Kantor Pos Semarang Jl. Pemuda No. 4 Semarang 50000, pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini dan oleh antara :

- I. **DWI INDARMANI**, Jabatan Kepala Regional VI Jawa Tengah dan D.I.Y., yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No 45 Semarang 50252, mewakili dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari,SH,M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM** No. KTP 3374150405650002 Jabatan Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak dan atas nama pemilik Ruangan dengan luas 9,6 m², yang berkedudukan di Gedung B Lantai 1Lingkungan Kantor Gubernur Jateng d/a Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax 024-8311266 Kota Semarang 50243, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah pemilik Ruangan dengan luas 9,6 m², yang berkedudukan di Gedung B Lantai 1Lingkungan Kantor Gubernur Jateng d/a Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax 024-8311266 Kota Semarang 50243
- c. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan Ruangan untuk perkantoran **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** berniat menyewakan Ruangan dengan luas 9,6 m², yang berkedudukan di Gedung B Lantai 1 Lingkungan Kantor Gubernur Jateng d/a Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax 024-8311266 Kota Semarang 50243 kepada **Pihak Pertama**.



h. 1

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Ruangan untuk LE Gubernur 50243D (selanjutnya disebut "Perjanjian") berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Sebuah Ruangan dengan luas 9,6 m², yang berkedudukan di Gedung B Lantai 1 Lingkungan Kantor Gubernur Jateng d/a Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax 024-8311266 Kota Semarang 50243D dengan batas-batas :
 - 1) Utara : Ruang Operator Setda Prov Jateng
 - 2) Barat : Halaman Parkir Gd. B Lantai 1
 - 3) Selatan : Lift Gd B Lantai 1
 - 4) Timur : Halaman Dalam Gd. B Lantai 1
- a. **Pihak Kedua** dengan ini menyewakan kepada **Pihak Pertama**, Ruangan sebagaimana tersebut dalam huruf a Pasal ini digunakan untuk keperluan kantor **Pihak Pertama**.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **Pihak Pertama** adalah :
 - a. Menggunakan Ruangan serta menata ruangan tersebut untuk keperluan kantor **Pihak Pertama**.
 - b. Mendapat jaminan dari **Pihak Kedua** akan dibebaskan terhadap segala gugatan dari pihak manapun yang berkaitan dengan hak atas ruangan yang disewa oleh **Pihak Pertama**.
 - c. Memperoleh penggantian waktu sewa apabila terdapat renovasi Ruangan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
 - d. Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain, **Pihak Pertama** berhak memperoleh penggantian obyek sewa menyewa tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu dari **Pihak Kedua**.
 - e. Memperoleh waktu toleransi selama 7 (tujuh) hari kalender untuk mengambil/memindahkan barang/peralatan yang menjadi milik **Pihak Pertama** apabila terjadi pemutusan jangka waktu Perjanjian atau setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) Hak **Pihak Kedua** adalah :
 - a. Memperoleh pembayaran biaya sewa Ruangan dari **Pihak Pertama**.
 - b. Memperoleh pemberitahuan dari **Pihak Pertama** apabila Ruangan akan direnovasi.
- (3) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah :
 - a. Membayar biaya sewa Ruangan kepada **Pihak Kedua** dengan ketentuan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini.



- b. Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa, **Pihak Pertama** wajib mengembalikan dan menyerahkan obyek sewa menyewa sesuai dengan kondisi terakhir saat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah :
- Pihak Kedua** menjamin bahwa Ruangan yang disewa **Pihak Pertama** adalah milik/dikelola oleh **Pihak Kedua** dan tidak sedang disewa ataupun dalam penguasaan pihak lain.
 - Pihak Kedua** menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, **Pihak Pertama** tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas properti berupa Ruko yang disewakan tersebut dan oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** dari segala tuntutan dan/atau gangguan dimaksud.
 - Pihak Kedua** menjamin bahwa Ruangan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan jika karena sebab apapun juga mengakibatkan **Pihak Pertama** tidak dapat menggunakan atau harus meninggalkan obyek sewa tersebut, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dikurangi uang sewa untuk masa sewa yang telah dijalani.

PASAL 3 BIAYA SEWA

- Biaya sewa obyek sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini untuk masa sewa tersebut dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp 8.000.000- (Delapan juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Biaya sewa tersebut pada ayat (1) tidak dikenakan PPh 10%.
- Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas biaya sewa tersebut di atas akan disetor melalui PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Wajib Potong dan bukti potong tersebut akan diserahkan kepada **Pihak Kedua**.
- Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara setor BEPEN BIRO UMUM SETDA PROV JTG No. Rekening 1034024070 pada tanggal 10-04-2018

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ataupun karena sebab lain,



pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktunya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **Para Pihak** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian **Pihak Pertama** menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian **Pihak Kedua** menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas **Para Pihak** menjadi tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan bobot kesalahan / kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan diantara Para Pihak yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada :

Pihak Pertama :

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS SEMARANG 50000, Alamat Jl. Pemuda No 4, Telp (024) 3543271
Fax (024) 3526865

Email 500kcp@posindonesia.co.id Up Kepala Kantor Pos Semarang 50000.

Pihak Kedua :

EDY SUPRIYANTA, SH, ATD, MM.

KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,
Alamat jalan Pahlawan No. 9 Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax 024-8311173
Kota Semarang 50243.



[Handwritten signature]

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan/perubahan Pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim,
 - b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima,
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- α. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- β. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terikat dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap Para Pihak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- χ. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh Para Pihak atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- δ. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun pada saat berlakunya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan **Para Pihak** dalam Perjanjian ini.



50
+

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan **Para Pihak** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **Para Pihak**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya
- (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (4) **Para Pihak** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN**

- (1) Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis (jika ada) akan diatur bersama oleh **Para Pihak** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** dalam Perjanjian tambahan (Addendum) atau Perjanjian perubahan (Amandemen) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



[Handwritten signature]

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat ditandatangani.

Pihak Pertama
✓ PT POS INDONESIA (PERSERO)
✓ KANTOR REGIONAL VI JAWA
TENGAH DAN DIY



DWI INDARMANI
KEPALA REGIONAL
JAWA TENGAH DAN DIY

Pihak Kedua



EDY SURRIYANTA, A.TD. SH. MM
KEPALA BIRO UMUM SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG

